

## BAB III

### SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SERTA PERAN AMERIKA SERIKAT DALAM PROTOKOL KYOTO

Pada Bab III ini akan memaparkan tentang sejarah awal mula Protokol Kyoto di bentuk, apa penyebab protokol dibentuk dan siapa saja yang terlibat, kemudian dilanjutkan perkembangan protokol Kyoto hingga berlakunya pada 2005. Bab ini juga akan memaparkan mengenai peran dan pengaruh Amerika Serikat dalam pembentukan Protokol Kyoto.

#### A. Sejarah dan Perkembangan Protokol Kyoto (1992-2005)

Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang khusus membahas dan menangani isu dan permasalahan lingkungan, perjanjian ini lahir dibawah UNFCCC (*United Nation Framerwork Conventio on Climate Change*) pada Desember tahun 1997 di Kyoto Jepang. Protokol Kyoto bukanlah perjanjian yang tiba-tiba ada, namun merupakan sambungan dari *Earth Summit* yang diadakan di Rio De Janiero Brazil tahun 1992. Konferensi lingkungan seperti Earth Summit di Brazil sendiri bukan yang pertama melaikan sudah diadakan cukup lama, konvesi lingkungan PBB pertama kali diselenggrakan pada tahun 1972 di Stockholm Swedia yang diberi nama *United Nation Conference on Human Environment* atau biasa di sebut dengan *Stockholm Conference*. *Stockholm Conference* sendiri membahas masalah lingkungan yang cukup umum seperti perhatian terhadap lingkungan yang rendah pada negara berkembang karena fokus pada percepatan industrialisasi tanpa didukung teknologi yang memadai, lalu permasalahan pada negara maju dimana kemajuan industrialisasi tidak dibarengi oleh peraturan dan penggunaan teknologi modern untuk mengurangi emisi.

Konferensi ini menghasilkan putusan seperti pengurangan polusi, perlindungan hutan, usaha pencarian energi alternatif, penjagaan sumber daya, pemajuan penelitian teknologi serta ada tambahan diluar isu lingkungan seperti penegakan HAM dan peniadaan senjata pemusnah masal<sup>61</sup>. Dalam konferensi ini menghasilkan *United Nation Enviroment Programme* (UNEP) yang merupakan agensi dari PBB yang bertugas untuk mengawasi kegiatan lingkungan dan membantu negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan undang-undang lingkungan.<sup>62</sup> Berdirinya UNEP di usulkan oleh Mustafa Kamal Tolba seorang peneliti asal mesir yang sekaligus merupakan ketua UNEP pertama (1975-1992), UNEP mendapatkan bantuan dana sebesar US\$100 juta pertahun dari berbagai negara dengan Amerika Serikat berkontribusi sebesar US\$40 juta.

Konferensi ini sendiri tidak berlangsung secara mulus karena keadaan pada saat itu berada pada masa perang dingin antara Warsaw Pact dan NATO, Uni soviet sendiri memboikot konferensi tersebut karena larangan bagi Jerman Timur untuk ikut.<sup>63</sup> Dalam diskusinya sendiri perwakilan dari Amerika Serikat menerima banyak protes dari negara berkembang di Asia dan Eropa Timur terutama masalah penggunaan senjata biologis *Agent Orange* pada saat perang Vietnam. Koferensi ini dinilai tidak berhasil mengurangi tingkat polusi dan pencemaran karena tidak mengikat negara-negara yang ikut dalam konferensi, serta fokusnya negara-negara dunia pada saat itu pada perkembangan ekonomi ditambah berlangsungnya Perang DIngin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam bentuk perlombaan baik dalam miiter, ekonomi

---

<sup>61</sup> Handl Gunther “Declaration of United Nations Conference on the Human Environment” Tulane University diakses dari <http://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html> 25 maret 2018

<sup>62</sup> Handl Ibid

<sup>63</sup> Handl Ibid

serta hegemoni sehingga menyebabkan konferensi ini kurang berlaku

Sedikitnya perubahan yang disebabkan oleh *Stockholm Conference* membuat banyak orang dan negara di dunia skeptikal kepada PBB karena dianggap tidak mampu membuat baik konferensi atau perjanjian yang dapat mengurangi tingkat emisi dan pengaruh perubahan iklim. PBB sendiri masih terus berusaha untuk memperjuangkan isu lingkungan, pada tahun 1980 UNEP sendiri melakukan konferensi kecil dan penelitian terhadap hubungan antara populasi, sumber daya dan lingkungan yang diadakan di Stockholm. Pada 1982 UNEP mengusulkan rancangan pembentukan komisi khusus untuk merencanakan pembangunan pro lingkungan jangka panjang untuk tahun 2000 dan seterusnya kepada PBB namun ditolak dengan alasan kurangnya rincian penjelasan dan data penelitian.<sup>64</sup> pada 1987 UNEP mengusulkan kembali rancangan mereka mengenai rancangan komisi pembangunan jangka panjang kepada PBB, rancangan kedua ini diterima oleh PBB dan meminta UNEP untuk menyiapkan konferensi demi membahas rancangan di depan seluruh negara.

Pada tahun 1992 diadakanlah Konferensi *Earth Summit* di Rio de Janeiro Brazil 3-14 Juni, konferensi ini dihadiri oleh 117 negara dan 2400 perwakilan dari berbagai NGO dan INGO. Konferensi ini bertujuan untuk mengajak semua pihak untuk bekerjasama membangun dan mewujudkan perkembangan bersih yang berkelanjutan, karena tidak bisa lagi hanya bergantung pada negara-negara maju yang dituntut untuk peduli. Ada beberapa point besar yang dibahas dalam konferensi ini seperti kontrol penggunaan bahan bakar, pengurangan penggunaan sumber daya berlebihan, memerangi perusakan lingkungan (penebangan berlebihan, pencemaran, pembakaran hutan), pengembangan bioteknologi,

---

<sup>64</sup> Handl Gunther "Rio Declaration on Environment and Development" Tulane University diakses dari <http://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html> 25 maret 2018

perlindungan satwa dan flora, memerangi kemiskinan, dan pemeliharaan serta peningkatan taraf hidup dunia. Dengan dasar penelitian panjang akan pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan, Earth Summit menunjukkan fakta saintifik kerusakan lingkungan diberbagai penjuru dunia. Adanya penelitian yang didukung oleh fakta tersebut diharap dapat membuka mata memicu rasa kepedulian atas lingkungan semua pihak yang mengikuti Earth Summit .<sup>65</sup>

Earth Summit atau *Barzil Conference* menjadi landasan bagi konferensi dan gerakan lingkungan lain dimasa depan seperti *Conference of Parties (COP)* dan *Earth Summit 2002*. Dalam konferensi Earth Summit 1992 menetapkan baik hak dan tanggung jawab negara-negara dalam pembangunan berkelanjutan dan perindungan serta pengolahan lingkungan. Konferensi tidak menyangkal hak negara untuk mengolah segala macam sumber daya yang ada dalam wilayahnya asalkan tidak berpengaruh pada keadaan lingkungan dinegara lain, konferensi juga menekankan bagi tiap-tiap negara untuk memperhatikan pengolahan sumber daya agar dapat bertahan untuk generasi berikutnya.<sup>66</sup> Konferensi juga menekankan semua negara baik berkembang maupun maju berkontribusi baik emisi dan kerusakan lingkungan, negara berkembang cenderung longgar dalam mengatur pengolahan lingkungan beserta sumber dayanya yang berakibat kepada kerusakan baik dalam bentuk penggundulan, pencemaran baik dari pertambangan atau industri dan sebagainya. Sebaliknya negara maju yang industrialisasinya sudah jauh berkembang akan menyebabkan pencemaran lewat polusi lewat produksi dan konsumsi bahan bakar yang tinggi.<sup>67</sup> Karena hal inilah

---

<sup>65</sup> United Nation. "The Rio Declaration of Environment and Development 1992" United Nation 1992 p. 3-14

<sup>66</sup> Hyder P. Joshep "Earth Summit 1992" Gale 2009. diakses dari <https://www.encyclopedia.com/environment/energy-government-and-defense-magazines/earth-summit-1992> pada 30 Maret 2018.

<sup>67</sup> Joshep Ibid

Konferensi meminta agar setiap negara berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan mengurangi kontribusi emisi, limbah dan polusinya.

Dalam konferensi Earth Summit 1992 menghasilkan dua buah perjanjian lingkungan internasional yaitu *Convention on Biological Diversity* dan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), kedua perjanjian ini diciptakan setelah mendapat dukungan dan persetujuan lebih dari 50% peserta konferensi. *Convention on Biological Diversity* biasa disebut *Biodiversity Covention* merupakan perjanjian yang berusaha melindungi keanekaragaman alam dengan cara merancang dan mengajukan pembangunan berkepanjangan ramah terhadap kehidupan di bumi, serta membagi secara adil keuntungan yang berasal dari penelitian sumber daya biologis.<sup>68</sup> Ada pula UNFCCC perjanjian kedua yang disepakati pada Earth Summit Brazil, perjanjian ini berupaya untuk mengurangi efek dari perubahan iklim dengan cara memangkas kadar gas rumah kaca. UNFCCC sendiri sudah diratifikasi lebih dari 190 negara, UNFCCC dapat meminta negara yang sudah meratifikasi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan informasi mengenai gas rumah kaca, membuat undang-undang untuk mengurangi produksi gas rumah kaca, dan melakukan kerja sama dengan negara lain untuk mempersiapkan diri akan efek dari perubahan iklim. UNFCCC juga dapat meminta negara maju untuk membantu negara berkembang baik dalam bentuk finansial, penelitian, maupun teknologi kepada berkembang terkait mengurangi pengaruh perubahan iklim. UNFCCC aktif dan mulai bekerja pada tahun 1994 setelah diratifikasi sebanyak 197.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Heinrich, M. "Handbook of the Convention on Biological Diversity: Edited by the Secretariat of the Convention on Biological Diversity", Earthscan, London, 2001

<sup>69</sup> Heinrich Ibid

Pada 1995 diadakan *Conference of Parties* atau COP pertama di Berlin, COP sendiri merupakan kegiatan yang diadakan untuk membantu kinerja UNFCCC, karena jika UNFCCC sendiri yang bekerja tidak akan bisa menurunkan kadar emisi sebanyak 5% dibawah standar tahun 1990 ditahun 2000an dan mengurangi efek dari perubahan iklim. COP juga menjadi kegiatan tahunan yang diadakan PBB untuk membahas permasalahan yang menyangkut baik emisi, lingkungan dan kemanusiaan. COP pertama di Jerman membahas lebih spesifik lagi mengenai apa saja yang masuk dalam kategori emisi berdasarkan hasil Earth Summit 1992 dan penelitian yang dilakukan sejak itu. Kemudian COP kedua diadakan di Geneva Swiss pada 1996 yang membahas penerimaan dan persetujuan hasil penelitian mengenai emisi oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*,<sup>70</sup> dilanjutkan mengenai regulasi dalam menangani emisi. Tahun 1997 COP ketiga diadakan di Kyoto Jepang dan pada konferensi ini lahirlah Protokol Kyoto, Protokol Kyoto adalah perpanjangan atau kelanjutan dari UNFCCC, keduanya memiliki dasar tujuan yang sama yaitu menurunkan tingkat emisi dan mengurangi pengaruh dari perubahan iklim.<sup>71</sup> Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mengikat bagi negara-negara peratifikasi, Protokol Kyoto sendiri mengatur batasan-batasan emisi baik polusi maupun limbah yang boleh dikeluarkan oleh negara. Protokol menargetkan untuk pengurangan tingkat emisi dunia sebanyak 5% dibawah standar emsis tahun 1990 dan penurunan suhu bumi sebanyak 0,28°-0,53°, usaha ini akan dimulai dari tahun 2008-2012.

---

<sup>70</sup> Wearth. Spencer “International Cooperation; Democracy and Politics advice” American Institute of Physics. 2011. diakses dari <https://history.aip.org/history/climate/internat.htm#S9> pada 6 April 2018

<sup>71</sup> United Nation Framework Convention on Climate Change “Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change” UNFCCC. 2012. diakses dari [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/items/1678.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/1678.php) pada 1 April 2018

Protokol Kyoto dalam aturan dan mekanismenya membagi negara-negara didunia menjadi 3 bagian yaitu:

- a) Annex I atau kategori negara industri maju (Amerika, Jepang, Rusia, Uni Eropa, Turki dan 37 negara lain) yang totalnya ada 43 negara, negara Annex I berkewajiban untuk mengurangi produksi emisi atau GRK sebanyak 5%.<sup>72</sup>
- b) Annex II yaitu negara maju yang tergabung dalam organisasi ekonomi internasional yang berkewajiban untuk membayar atau membantu secara finansial kepada negara berkembang dalam isu lingkungan dan emisi, terdapat 24 negara yang termasuk dalam annex II dan I (Uni Eropa, Jepang, turki, Australia, Amerika, dan 20 negara lainnya).<sup>73</sup>
- c) non-Annex yaitu negara negara berkembang atau negara dunia ketiga, kategori negara non-Annex akan menerima bantuan secara finansial dari negara kategori Annex II dalam menangani isu lingkungan dan emisi.

Protokol Kyoto masih mengalami penyempurnaan serta melakukan pengiriman advokat-advokatnya kepada tiap-tiap negara untuk mendukung dan mengikuti protokol, terutama negara industri maju. Pada COP 4 yang diadakan di Buenos Aires Argentina 1998, Protokol Kyoto mengalami penyempurnaan baik aturan, mekanisme dan standar prosedur. Pada konferensi ini munculah *Buenos Aires Plan of Action*

---

<sup>72</sup> United Nation Framework Convention on Climate Change “List of Annex I Parties to the Convention” diakses dari [“http://unfccc.int/parties\\_and\\_observers/parties/annex\\_i/items/2774.php”](http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php), pada 3 januari 2018

<sup>73</sup> United Nation Framework Convention on Climate Change “List of Annex II Parties to the Convention” diakses dari [“http://unfccc.int/cop3/fccc/climate/annex2.htm”](http://unfccc.int/cop3/fccc/climate/annex2.htm), pada 3 januari 2018

(BAPA) yaitu merupakan kesepakatan untuk perpanjangan waktu penyempurnaan aturan, mekanisme dan standar prosedur Protokol. Kesepakatan ini muncul karena penyempurnaan aturan protokol tidak dapat selesai dengan baik dalam waktu singkat, untuk memperoleh hasil yang maksimal maka penyempurnaan aturan perpanjangan hingga COP 6. Selain itu BAPA sendiri dimaksudkan untuk memberi waktu mengembangkan serta distribusi teknologi ramah lingkungan bagi negara-negara berkembang dan membantu negara-negara yang terkena pengaruh perubahan iklim.<sup>74</sup>

COP 6 dilaksanakan di Bonn Jerman pada November tahun 2000, pada konferensi ada beberapa perdebatan terutama pada masalah pemotongan emisi dan kebijakan pembayaran pajak emisi yang diumumkan pada konferensi tersebut. Protes dilayangkan oleh negara industri maju, terutama Amerika Serikat dan Kanada, kedua negara ini menolak adanya pajak emisi serta pengurangan emisi sebanyak 7%-10% yang ditetapkan oleh rancangan aturan Protokol Kyoto. Amerika dan Kanada menilai bahwa kedua hal tersebut terlalu berat apalagi akan berpengaruh buruk pada ekonomi kedua negara. Menyambut protes yang dilayangkan forum konferensi tetap teguh pada tujuan awal yaitu menetapkan aturan, mekanisme dan standar prosedur Protokol Kyoto, ditambah dukungan mayoritas negara yang hadir melahirkan *Bonn Agreement* dimana Protokol Kyoto akan mementingkan kepentingan mayoritas ketimbang sebagian kecil. Dengan adanya agreement ini membuat beberapa negara industri maju enggan mengikuti protokol terutama Kanada dan Amerika.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> United Nations Framework Convention on Climate Change “Climate change meeting adopts Buenos Aires Plan of Action” 2002 diakses dari <http://unfccc.int/cop4/infomed/p111498.html> pada 4 April 2018

<sup>75</sup> Vrolijk Christian. “The Bonn Agreement- The World Agrees to Leave America on the Sideline”. The Royal Institute of International Affairs. Agustus 2008



Pengembangan dan penyempurnaan aturan dan mekanisme Protokol Kyoto berlanjut pada COP 7 yang dilaksanakan di Marrakesh Maroko pada 2001, pada konferensi ini perwakilan negara-negara dan pihak dari COP sendiri mendiskusikan serta meramu kefleksibelan mekanisme laporan dan metodologi, dan yang utama pergantian penggunaan lahan dan area hutan (*Land Use, Land Use Change and Forestry/ LULUCF*). LULUCF sendiri merupakan salah satu regulasi dari Protokol Kyoto yang nantinya akan mengatur mengenai penggunaan lahan hutan, lahan pertanian, lahan peternakan dan pengijauan hutan. Regulasi ini dimaksudkan untuk mengurangi penyempitan lahan hutan dunia, terutama dinegara-negara berkembang.<sup>76</sup> Dalam konferensi ketujuh ini juga lahirlah *Marrakesh Accords*, yaitu merupakan keseluruhan kesepakatan pada COP 7 berupa rancangan bagi negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan yang di buat oleh protokol. Marrakesh Accords juga mengatur pemberian bantuan baik tranfer teknologi, bantuan kapasitas pembangunan (bantuan tenaga), dan bantuan keuangan demi memaksimalkan program Protokol Kyoto, serta pemindahan Turki dari kategori negara Annex II ke Annex I dan persetujuan Kazakstan mengikuti Protokol Kyoto.<sup>77</sup>

Marrakesh Accords menjadi dasar dari konferensi yang diadakan kedepanya seperti COP 8 di New Delhi India dan COP 9 di Milan Italia. Pada COP 8 lewat *Delhi Declaration* meminta adanya upaya dari negara maju untuk membantu negara berkembang dari segi teknologi dan tenaga kerja dari negara kategori Annex I dalam upaya mewujudkan

---

<sup>76</sup> United Nation Framework Convention on Climate Change. "Land Use, Land Use Change and Forestry" UNFCCC. Diakses dari [http://unfccc.int/land\\_use\\_and\\_climate\\_change/lulucf/items/3063.php](http://unfccc.int/land_use_and_climate_change/lulucf/items/3063.php) pada 5 April 2018

<sup>77</sup> Elzen de M.G.J and Moor de A.P.G "The Bonn Agreement and Marrakesh Accords; an updated analysis" RIVM Report. 2001 p.7

pembangunan berkepanjangan untuk mengurangi pengaruh dari perubahan iklim, lalu ditambah adanya dorongan untuk mencari energi dan pengolahan sumber daya yang ramah lingkungan serta penyaluran sumber daya ke negara-negara berkembang untuk mengatasi kemiskinan.<sup>78</sup> Deklarasi ini sendiri mendapat respon positif dari banyak negara terutama negara berkembang, namun mendapat sedikit tanggapan dingin dari negara industri maju seperti Rusia, Australia dan Amerika. Rusia sendiri masih ragu dan meminta waktu untuk membuat keputusan sementara Australia dan Amerika Serikat masih tetap teguh pada ketidak setujuannya karena merasa tidak ada keuntungan bagi kedua negara tersebut jika mengikuti apa yang diputuskan pada Deklarasi Delhi dan COP 8.

Tahun 2003 dilaksanakanlah COP ke 9 di Milan dengan agenda utama untuk membahas *Adaptation Fund* yaitu program bantuan finansial pada negara berkembang untuk mempersiapkan diri dan beradaptasi pada pengaruh perubahan iklim, program ini diusulkan pada COP 7 yang dilakukan di Maroko. Didalam program ini pula terdapat tambahan berupa penyaluran bantuan dalam bentuk teknologi demi mempercepat proses adaptasi negara-negara berkembang.<sup>79</sup> Selain membahas Funding COP 9 juga membahas rancangan agenda atau program Protokol Kyoto setelah tahun 2012, dalam pembahasannya Protokol Kyoto akan melakukan program yang kurang lebih sama seperti pengurangan emisi bagi negara industri maju, pemberian bantuan bagi negara miskin dan berkembang, pengembangan pembangunan berkelanjutan, perlindungan lahan hijau dinegara-negara par-

---

<sup>78</sup> United Nation Framework Convention on Climate Change Eighth Conference of Parties “The Delhi Ministerial Declaration on Climate Change and Sustainable Development” UNFCCC . 2002

<sup>79</sup> United Nation Framework Convention on Climate Change “Adaptation Fund” UNFCCC. Diakses dari [http://unfccc.int/cooperation\\_and\\_support/financial\\_mechanism/adaptation\\_fund/items/3659.php](http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund/items/3659.php) pada 5 April 2018

paru dunia. Namun agenda dan program pasca 2012 yang direncanakan ini belum final, UNFCCC dan partisipan Protokol Kyoto masih harus melihat perjalanan dan hasil saat protokol berlaku pada 2008 hingga 2012 untuk memutuskan program Protokol Kyoto kedepannya.

Tahun 2004 COP 10 dilaksanakan di Buenos Aires Argentina, konferensi ini mengambil dasar Buenos Aires Plan of Action (BAPA) yang di usulkan pada COP 4 yang diadakan di tempat yang sama. Dalam diskusinya berupa mekanisme pengembangan teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi pengaruh perubahan iklim serta transfernya ke negara-negara berkembang, dilanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut metode untuk mempersiapkan negara-negara pada pengaruh dari perubahan iklim. Konferensi ini juga membahas lebih lanjut mengenai program dan agenda Protokol Kyoto pasca tahun 2012 setelah berakhirnya periode pertama berjalannya Protokol Kyoto.<sup>80</sup> Konferensi ini juga mengimplementasikan Marrakesh Accords COP 7 pada kebijakan dalam transfer teknologi kepada negara berkembang, COP 10 dapat dikatakan sebagai konferensi fiksasi dari kesepakatan-kesepakatan COP-COP sebelumnya.

Protokol Kyoto mulai aktif pada februari 2005 setelah Rusia setuju meratifikasi pada November 2004, ratifikasi Rusia menandai terpenuhinya persyaratan 55% minimal dari partisipan sehingga protokol dapat mulai berlaku. Pada akhir 2005 diadakanlah COP 11 bertempat di Montreal Quebec Kanada, konferensi ini beragendakan pembahasan ulang aturan dan mekanisme protokol serta mengingatkan kembali kepada seluruh negara partisipan protokol, terutama yang termasuk kedalam kategori Annex I untuk bersungguh-sungguh dalam usaha menurunkan emisi demi mengurangi pengaruh perubahan iklim. Dalam konferensi ini terbentuklah *Montreal*

---

<sup>80</sup> Earth Negotiations Bulletin "Summary of the Eleventh Conference of Parties UN Framework Convention on Climate Change" iisd Report Service. Desember 2005. p.3

*Plan of Action* yang berisi pengakuan atas berlakunya Protokol Kyoto, pemetaan program dan agenda protokol, pengumpulan dana, serta rancangan program setelah 2012 demi menuntaskan perubahan iklim.<sup>81</sup>

## **B. Peran Amerika Serikat dalam Protokol Kyoto**

Amerika Serikat merupakan negara yang banyak terlibat dalam mayoritas isu dan agenda internasional tidak terkecuali Protokol Kyoto dengan isu perubahan iklim, Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu negara pertama yang memasukan perlindungan terhadap lingkungan kedalam peraturan dan undang-undangnya, sebagai contohnya adalah *Harbor and River Act* tahun 1899 dimana mengatur pelarangan perubahan, pengurangan, dan penambahan baik bentuk maupun isi dari sungai, kanal dan pelabuhan tanpa seizin pemerintah.<sup>82</sup> Kepedulian Amerika Serikat terhadap lingkungan tidak hanya ditujukan pada isu dalam negeri namun juga pada isu lingkungan internasional, Amerika menunjukkan kepedulian dengan kehadirannya hampir disetiap konvensi dan konferensi lingkungan internasional yang diadakan PBB maupun pihak lain.

Pada Earth Summit 1992 yang diadakan di Rio De Janiero Brazil, konferensi ini menghasikan dua perjanjian yaitu *Biodiversity Convention* dan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Amerika Serikat lewat Presidennya saat itu George H.W Bush menandatangani Earth Summit dan memeberikan rancangan mengenai perlindungan hutan dan pengurangan polusi udara, serta tambahan dana program perlindungan hutan sebesar US\$ 2.5

---

<sup>81</sup> Dion Stephen Hon. "The Montreal Action Plan". UNFCCC Conference of Parties. December 2005

<sup>82</sup> Charles K. McFarland." The Federal Government and Water Power, 1901-1913: A Legislative Study in the Nascence of Regulation, Land Economics". p 441-452 .November. 1966

miliar yang akan disalurkan Amerika lewat bank dunia. Presiden George Bush juga menyampaikan bahwa tidak cuma negara maju yang hanya berusaha mengurangi produksi emisi dan menerapkan undang-undang perlindungan lingkungan, namun juga negara berkembang yang dinilai sebagai calon kontributor emisi terbanyak dimasa depan karena kemajuan industrialisasi tanpa memperhatikan lingkungan terutama Tiongkok dan India. Namun disamping tanda tangan dan pernyataan oleh Presiden George Bush, Amerika Serikat menolak untuk menandatangani rancangan *Biodiversity Convention* karena akan mempengaruhi industri farmasi Amerika Serikat.<sup>83</sup> Untuk perjanjian kedua yang dihasilkan yaitu UNFCCC, Amerika Serikat menyatakan dukungan penuhnya terhadap perjanjian tersebut dan bersedia memberikan bantuan baik finansial maupun tenaga ahli dalam kinerja mendatang. Dalam dukungannya terhadap UNFCCC, Amerika Serikat tetap meminta untuk baik negara maju maupun berkembang tetap ikut berkontribusi karena isu lingkungan dan perubahan iklim bukanlah tanggung jawab satu atau beberapa negara saja.

Amerika Serikat berniat menjadi yang terdepan dalam melindungi lingkungan bumi, dengan kemajuan teknologi dan pengetahuannya Amerika berusaha untuk memberikan contoh bagaimana cara melindungi lingkungan. setelah menandatangani Earth Summit Amerika memulai program penambahan generator tenaga angin didalam negeri, demi mengurangi emisi dari produksi energi dan mewujudkan eneri terbaharukan. Lewat *Energy Policy Act 1992* yang mengatur penggunaan teknologi penghasil energi yang ramah lingkungan,<sup>84</sup> dengan adanya kebijakan ini diharapkan

---

<sup>83</sup> Fiorino J. Daniel dan Binder Gordon "Reflections on US Environmental Policy: An Interview with William K. Reilly" Washington DC. America University p.6

<sup>84</sup> 102<sup>nd</sup> Congress "H.R.776 - Energy Policy Act of 1992" Washington DC. 1992. Diakses dari

Amerika Serikat dapat memperoleh sumber energi yang lebih bersih dan menurunkan kadar emisi domestik serta memberi contoh kepada negara-negara lainnya.

Dalam COP kedua yang diakan pada 1996 di Geneva Swiss, Amerika Serikat lewat perwakilannya Timothy Wirth menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap konferensi dan hasil dari konferensi. Wirth memberi masukan kepada konferensi berupa dasar penelitian yang digunakan harus terus diperbaharui untuk untuk memaksimalkan hasil konferensi mendatang, pada konferensi kedepan harus lebih fokus kepada target konferensi yang diikat secara hukum, keputusan dan progres kerja harus selesai pada COP 3 mendatang di Kyoto. Wirth juga menyampaikan bahwa apapun hasilnya kedepannya tetap harus menghormati kebijakan dan keputusan nasional dari tiap-tiap negara partisipan konferensi, hasil konferensi mendatang haruslah fleksibel kepada keadaan tiap-tiap negara sehingga dapat menjaga komitmennya.<sup>85</sup> Amerika Serikat sendiri menjadi salah satu negara pendana konferensi, Presiden Bill Clinton memberikan bantuan dana demi operasional konferensi sebesar US\$.11 juta pada COP kedua ini.

COP 3 diadakan pada 1997 di Kyoto Jepang, konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 170 perwakilan dari tiap negara salah satunya Amerika Serikat. COP 3 menghasilkan sebuah perjanjian yang menjadi revolusi bagi isu lingkungan dan perbahan iklim yaitu Protokol Kyoto, Presiden Amerika Serikat saat itu Bill Clinton dan Wakil Presiden Al Gore yang mengikuti konferensi menandatangani Protokol. Presiden Bill

---

<https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/776> pada 6 April 2018

<sup>85</sup> United Nation Framework Convention on Climate Change.  
“REPORT OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES

ON ITS SECOND SESSION, HELD AT GENEVA FROM 8 TO 19 JULY 1996” Conference of Parties. UNFCCC. 29 Oktober 1996.

Clinton terkenal peduli terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim, hal ini bisa dilihat dari kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan saat menjabat seperti mengamandemen *Safe Drinking Water Act of 1972* pada tahun 1996 dan *National Fish and Wildlife Foundation Improvement Act of 1994*. Presiden Clinton dan Wakil Presiden Al Gore menandatangani Protokol Kyoto sebagai bentuk persetujuan dan dukungannya, hal ini mendapat respon baik dari banyak negara partisipan COP 3 saat itu. Harapan UNFCCC dan Protokol Kyoto sendiri terhadap Amerika Serikat adalah menjadi gambaran atau contoh kepada negara lain, sebagai negara industri besar yang peduli terhadap isu lingkungan serta perubahan iklim kemudian meratifikasi Protokol Kyoto. Dengan kemungkinan ratifikasinya Amerika Serikat akan menarik negara lain untuk ikut mendukung dan meratifikasi agar kerja dan hasil dari Protokol Kyoto menjadi maksimal.

Presiden Clinton dan Wakil Presiden Al Gore membawa Protokol Kyoto kedalam kongres untuk meminta tanggapan dan persetujuan ratifikasi, namun kongres menolak untuk meratifikasi protokol dengan hasil perbandingan mutlak 95-0. Keputusan kongres untuk menolak meratifikasi Protokol Kyoto di dukung oleh senator Chuck Hagel dan Robert Byrd, keputusan kongres Amerika Serikat untuk menolak Protokol Kyoto biasa disebut *Byrd-Hagel Resoulution 1997* yaitu keputusan untuk tidak meratifikasi protokol. Dalam resolusi tersebut kongres menuliskan jelas bahwa tidak akan meratifikasi Protokol Kyoto karena akan membahayakan ekonomi dan politik Amerika Serikat, persyaratan untuk Amerika Serikat menurunkan emisinya sebanyak 5%-10% hingga 2005 dianggap memberatkan.<sup>86</sup> Protokol Kyoto juga dianggap tidak adil karena hanya negara maju yang dikenakan

---

<sup>86</sup> United States Senate Committee on Environment and Public Works 114th Congress "LESSONS FROM KYOTO: PARIS AGREEMENT WILL FAIL NATIONAL ECONOMIES AND THE CLIMATE" United States Senate. 21 April 2016. p.8

pengurangan emisi sedangkan negara berkembang tidak, Kongres hanya akan meratifikasi protokol saat semua negara mau mengurangi emisinya baik sesama negara maju maupun berkembang.

Protokol Kyoto merupakan sebuah perjanjian yang dibentuk oleh UNFCCC pada COP 3 tahun 1997 di Kyoto Jepang, Protokol Kyoto sendiri memiliki tujuan utama untuk menurunkan tingkat emisi dunia sehingga dapat mengurangi pengaruh dari pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan tersebut Protokol Kyoto mengharuskan negara yang ikut didalamnya untuk mengurangi emisinya sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Keputusan kongres Amerika Serikat untuk menolak meratifikasi Protokol Kyotopun menjadi hantaman kuat bagi usaha melawan pengaruh perubahan iklim dan protokol sendiri, karena seperti yang kita tahu Amerika Serikat merupakan negara industrial dan penghasil emisi besar disamping kepeduliannya terhadap isu lingkungan dan iklim. Penolakannya akan membuat negara industri dan penghasil emisi lain ikut ragu terhadap protokol karena akan mempengaruhi industri dan persaingan ekonominya terhadap negara-negara lain yang menolak meratifikasi, contohnya seperti Rusia, Kanada, dan Australia yang ragu untuk mengikuti protokol saat Amerika menolak.